

**PERAN LAYANAN KEANGGOTAAN DALAM MENINGKATKAN AKSES
INFORMASI PUBLIK DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Rachell Putra Ramdhani¹, Marlini²

¹ ²Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang

E-mail: rputraramdhani@gmail.com

Abstrak

Layanan keanggotaan merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan karena berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan berbagai inovasi layanan, baik berbasis digital maupun non-digital, namun optimalisasi peran layanan keanggotaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan keanggotaan dalam meningkatkan akses informasi publik melalui kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap artikel ilmiah yang membahas inovasi layanan digital, konsep learning commons, pengembangan koleksi, layanan referensi, dan layanan sirkulasi mandiri di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa layanan keanggotaan memiliki peran strategis dalam mendukung integrasi layanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi koleksi, serta peningkatan efektivitas layanan referensi dan sirkulasi mandiri. Namun demikian, pemanfaatan layanan keanggotaan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, kompetensi sumber daya manusia, dan rendahnya literasi informasi pemustaka. Kajian ini menegaskan bahwa penguatan layanan keanggotaan melalui digitalisasi, peningkatan kompetensi pustakawan, serta integrasi layanan secara menyeluruh merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses informasi publik. Dengan pengelolaan layanan keanggotaan yang efektif, perpustakaan daerah dapat berperan lebih optimal sebagai lembaga pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Layanan keanggotaan, akses informasi publik, perpustakaan daerah

Abstract

Membership services are a fundamental component of library service provision, as they serve as the primary gateway for the public to access information. The Office of Archives and Library of West Sumatra Province has implemented various service innovations, both digital and non-digital; however, the role of membership services in optimizing public access to information remains challenged. This study aims to analyze the role of membership services in enhancing public information access through a literature review of relevant previous studies. The research employs a qualitative approach using a literature study method by articles focusing on digital service innovation, the learning commons concept, collection development, reference services, and self-service circulation at the Office of Archives and Library of West Sumatra Province. The findings indicate that membership services play a

strategic role in supporting service integration, digital technology utilization, collection optimization, and the effectiveness of reference and self-service circulation services. Nevertheless, the utilization of membership services has not been fully optimized due to limitations in infrastructure, human resource competencies, and users' information literacy. This study emphasizes that strengthening membership services through digitalization, librarian competency development, and integrated service management is essential to improving public access to information. Effective management of membership services enables regional libraries to function more optimally as inclusive and sustainable public service institutions.

Keywords: Membership services, access to public information, regional libraries

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan latar belakang permasalahan yang dikaji, isu-isu yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta ulasan penelitian terdahulu yang relevan. Perpustakaan sebagai lembaga layanan publik memiliki peran strategis dalam menjamin keterbukaan dan pemerataan akses informasi bagi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi intelektual. Dalam konteks pemerintahan daerah, perpustakaan tidak hanya berperan sebagai penyedia koleksi informasi, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong perpustakaan untuk beradaptasi dengan model layanan yang lebih modern, inklusif, dan berbasis digital. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh jenis layanan perpustakaan menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung akses informasi publik.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan adalah layanan keanggotaan. Layanan ini merupakan pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan perpustakaan, seperti layanan sirkulasi, referensi, dan layanan berbasis teknologi informasi. Keberadaan layanan keanggotaan menentukan sejauh mana pemustaka dapat memanfaatkan sumber informasi yang tersedia secara optimal. Effendi dan Rahmah (2019) menegaskan bahwa integrasi layanan serta kemudahan akses menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan. Dengan demikian, layanan keanggotaan memiliki posisi strategis dalam menjamin akses informasi yang setara dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelayanan perpustakaan, termasuk dalam pengelolaan layanan keanggotaan. Inovasi layanan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi

pelayanan publik. Penelitian Oktavia dan Frinaldi (2024) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi digital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mendorong perubahan budaya kerja aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan tidak hanya memperluas jangkauan akses informasi, tetapi juga mempermudah interaksi antara pemustaka dan perpustakaan. Oleh karena itu, layanan keanggotaan perlu dikelola secara adaptif seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Selain digitalisasi, kualitas layanan perpustakaan juga ditentukan oleh ketersediaan koleksi yang relevan dan keberfungsian layanan pendukung. Dhia dan Erlianti (2024) menekankan bahwa pengembangan koleksi yang mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka merupakan syarat utama dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Koleksi yang tidak relevan berpotensi menurunkan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan. Dalam konteks ini, layanan keanggotaan berperan sebagai penghubung antara pemustaka dan sumber informasi yang tersedia, sehingga pengelolaan layanan keanggotaan yang baik dapat mengarahkan pemustaka untuk memanfaatkan koleksi secara optimal.

Meskipun memiliki peran strategis, pemanfaatan layanan keanggotaan di perpustakaan belum sepenuhnya optimal. Effendi dan Rahmah (2019) mengungkapkan bahwa revitalisasi layanan melalui konsep *learning commons* masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan kesiapan sumber daya manusia. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya intensitas kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh pemustaka. Layanan keanggotaan yang seharusnya menjadi penggerak utama akses informasi belum berfungsi secara maksimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan layanan dan implementasi di lapangan.

Kesenjangan serupa juga ditemukan pada layanan referensi sebagai bagian integral dari layanan perpustakaan. Maulana et al. (2025) menunjukkan bahwa layanan referensi memiliki potensi besar dalam membantu pemustaka memperoleh informasi yang akurat dan relevan, namun pemanfaatannya masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan keterbatasan kompetensi pustakawan. Rendahnya intensitas interaksi pemustaka dengan layanan referensi turut dipengaruhi oleh belum optimalnya layanan keanggotaan sebagai sarana awal pengenalan dan pendampingan pemustaka.

Permasalahan lain terlihat pada layanan sirkulasi mandiri yang dirancang untuk mendukung kemudahan dan efisiensi akses informasi. Destrina Ningsih dan Primadesi (2025) menyatakan bahwa layanan sirkulasi mandiri mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi masih menghadapi kendala teknis serta rendahnya pemahaman pengguna. Minimnya

pendampingan pustakawan menyebabkan layanan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, layanan keanggotaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemustaka agar inovasi layanan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan layanan perpustakaan bersifat kompleks dan saling berkaitan antara aspek layanan, sumber daya manusia, teknologi, dan pemustaka. Layanan keanggotaan belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akses informasi publik. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada layanan tertentu, seperti layanan referensi, pengembangan koleksi, atau sirkulasi, tanpa mengkaji peran layanan keanggotaan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait optimalisasi layanan keanggotaan di perpustakaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan keanggotaan dalam meningkatkan akses informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melalui kajian literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi strategis layanan keanggotaan dalam mendukung pemanfaatan layanan perpustakaan serta menjadi rujukan bagi pengelola perpustakaan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan layanan keanggotaan. Dengan demikian, layanan keanggotaan diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan keterbukaan dan pemerataan akses informasi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis peran layanan keanggotaan dalam meningkatkan akses informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kajian konseptual dan hasil penelitian terdahulu (Moleong, 2018). Studi literatur dilakukan dengan menelaah artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik layanan keanggotaan, layanan perpustakaan, dan akses informasi publik (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pengelompokan sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara membandingkan,

mensintesis, dan menginterpretasikan temuan-temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran layanan keanggotaan dalam konteks perpustakaan daerah (Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Keanggotaan sebagai Pintu Masuk Akses Informasi Publik

Layanan keanggotaan merupakan komponen fundamental dalam sistem layanan perpustakaan karena berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik. Melalui keanggotaan, pemustaka memperoleh hak dan kemudahan dalam memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan, termasuk layanan sirkulasi, referensi, serta layanan berbasis teknologi digital. Dalam konteks Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, layanan keanggotaan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan keterbukaan informasi dengan praktik pelayanan di lapangan. Effendi dan Rahmah (2019) menegaskan bahwa integrasi layanan serta kemudahan akses merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan. Oleh karena itu, layanan keanggotaan tidak semestinya dipandang sebatas proses administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjamin pemerataan akses informasi publik.

Perkembangan layanan perpustakaan yang mengarah pada integrasi ruang, layanan, dan teknologi semakin memperkuat peran layanan keanggotaan. Penerapan konsep *learning commons* menunjukkan bahwa pemustaka membutuhkan akses yang fleksibel dan terpadu terhadap berbagai sumber informasi (Effendi & Rahmah, 2019). Dalam praktiknya, keanggotaan menjadi syarat utama bagi pemustaka untuk memanfaatkan ruang belajar, koleksi, dan fasilitas teknologi yang tersedia. Namun demikian, rendahnya pemahaman pemustaka mengenai fungsi dan manfaat keanggotaan menyebabkan pemanfaatan layanan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan layanan keanggotaan perlu diimbangi dengan pengelolaan yang aktif, komunikatif, dan berorientasi pada edukasi pengguna.

Transformasi digital turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan layanan keanggotaan. Penelitian Oktavia dan Frinaldi (2024) menunjukkan bahwa inovasi layanan berbasis aplikasi digital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik. Digitalisasi layanan membuka peluang pengembangan sistem keanggotaan daring yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Melalui layanan keanggotaan digital, proses pendaftaran,

pembaruan data, serta akses layanan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Inovasi ini berpotensi memperluas jangkauan layanan perpustakaan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Meskipun demikian, optimalisasi layanan keanggotaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Effendi dan Rahmah (2019) mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana prasarana serta kesiapan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam implementasi layanan terpadu. Selain itu, kesenjangan literasi informasi di kalangan pemustaka juga berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan yang telah tersedia. Dalam kondisi tersebut, layanan keanggotaan seharusnya berfungsi sebagai sarana edukasi awal bagi pemustaka mengenai pemanfaatan layanan dan sumber informasi perpustakaan. Tanpa penguatan fungsi ini, layanan keanggotaan belum sepenuhnya mampu mendorong akses informasi publik secara merata.

Peran Layanan Keanggotaan dalam Mendukung Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital

Inovasi layanan perpustakaan berbasis digital menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan akses informasi publik. Transformasi digital mendorong perpustakaan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, layanan keanggotaan memegang peran sentral sebagai pintu masuk utama akses layanan digital perpustakaan. Oktavia dan Frinaldi (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur, tetapi juga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Layanan keanggotaan berfungsi sebagai penghubung antara pemustaka dan sistem layanan digital yang dikembangkan oleh perpustakaan.

Digitalisasi layanan keanggotaan memungkinkan pemustaka untuk mengakses layanan perpustakaan secara lebih fleksibel dan mandiri. Melalui sistem keanggotaan berbasis digital, proses pendaftaran, verifikasi data, serta pemanfaatan layanan dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oktavia dan Frinaldi (2024) menunjukkan bahwa inovasi digital mampu menyederhanakan prosedur pelayanan dan meningkatkan efektivitas layanan. Dalam konteks perpustakaan, sistem keanggotaan digital berpotensi meningkatkan jumlah anggota aktif serta memperluas jangkauan layanan informasi, sejalan dengan upaya mendukung keterbukaan akses informasi publik.

Namun, keberhasilan inovasi layanan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan pemustaka. Perubahan budaya

kerja aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi layanan digital (Oktavia & Frinaldi, 2024). Dalam layanan keanggotaan, pustakawan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada pemustaka agar mampu memanfaatkan layanan digital secara optimal. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, layanan keanggotaan digital berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, inovasi layanan digital perlu diintegrasikan dengan sistem layanan perpustakaan lainnya untuk memberikan manfaat yang optimal. Layanan keanggotaan yang terhubung dengan layanan sirkulasi, referensi, dan koleksi digital akan mempermudah pemustaka dalam mengakses informasi secara menyeluruh. Effendi dan Rahmah (2019) menegaskan bahwa integrasi layanan merupakan kunci dalam meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan. Dengan sistem keanggotaan yang terintegrasi, pemustaka dapat mengakses berbagai layanan hanya melalui satu identitas keanggotaan, sehingga memperkuat peran layanan keanggotaan sebagai penggerak utama akses informasi publik.

Layanan Keanggotaan dalam Mendukung Pemanfaatan Koleksi dan Layanan Referensi

Pemanfaatan koleksi dan layanan referensi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan perpustakaan dalam menyediakan akses informasi publik. Namun, optimalisasi kedua layanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari efektivitas layanan keanggotaan. Keanggotaan menjadi prasyarat utama bagi pemustaka untuk mengakses koleksi cetak maupun digital serta memperoleh layanan referensi secara optimal. Dalam konteks Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, layanan keanggotaan berperan sebagai penghubung awal antara pemustaka dan sumber informasi yang tersedia. Tanpa pengelolaan layanan keanggotaan yang baik, potensi koleksi dan layanan referensi tidak akan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Pengembangan koleksi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan fondasi utama dalam peningkatan akses informasi. Dhia dan Erlianti (2024) mengungkapkan bahwa pengembangan koleksi telah dilakukan melalui proses seleksi dan pengadaan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran serta kurang optimalnya analisis kebutuhan pemustaka. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan koleksi perpustakaan. Dalam hal ini, layanan keanggotaan memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pemustaka dengan koleksi yang tersedia. Data keanggotaan dapat dimanfaatkan untuk memetakan profil, minat, dan kebutuhan informasi pemustaka secara lebih akurat sehingga pengembangan koleksi dapat dilakukan secara lebih

terarah.

Selain koleksi, layanan referensi juga memiliki peran penting dalam membantu pemustaka memperoleh informasi yang tepat dan relevan. Maulana et al. (2025) menegaskan bahwa layanan referensi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas akses informasi masyarakat. Namun, pemanfaatan layanan referensi masih relatif rendah akibat kurangnya sosialisasi dan keterbatasan kompetensi pustakawan. Dalam konteks ini, layanan keanggotaan dapat difungsikan sebagai sarana awal untuk mengenalkan layanan referensi kepada pemustaka. Keanggotaan yang disertai dengan edukasi mengenai jenis dan manfaat layanan referensi berpotensi mendorong pemustaka untuk memanfaatkan layanan tersebut secara lebih aktif.

Integrasi layanan keanggotaan dengan layanan koleksi dan referensi memungkinkan perpustakaan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Data keanggotaan dapat digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi koleksi, pendampingan layanan referensi, serta penyampaian informasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dengan pendekatan tersebut, layanan keanggotaan tidak hanya berfungsi sebagai identitas pengguna, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam optimalisasi pemanfaatan koleksi dan layanan referensi yang berorientasi pada kebutuhan pemustaka.

Peran Layanan Keanggotaan dalam Optimalisasi Layanan Sirkulasi Mandiri

Layanan sirkulasi mandiri merupakan salah satu inovasi perpustakaan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan akses informasi bagi pemustaka. Keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada sistem keanggotaan yang terkelola dengan baik, karena identitas keanggotaan menjadi prasyarat utama dalam penggunaan layanan sirkulasi berbasis teknologi. Dalam konteks Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, layanan keanggotaan berfungsi sebagai penghubung antara pemustaka dan sistem sirkulasi mandiri. Tanpa layanan keanggotaan yang efektif, inovasi sirkulasi mandiri tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Destrina Ningsih dan Primadesi (2025) menunjukkan bahwa layanan sirkulasi mandiri mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi antrean pemustaka. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya kendala berupa gangguan teknis serta rendahnya pemahaman pengguna terhadap mekanisme layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak serta-merta menjamin keberhasilan layanan. Dalam kondisi tersebut, layanan keanggotaan memiliki peran penting sebagai sarana edukasi awal dan pendampingan bagi pemustaka. Melalui layanan keanggotaan, pemustaka dapat memperoleh

informasi dan bimbingan terkait penggunaan layanan sirkulasi mandiri secara tepat.

Selain aspek teknis, kesiapan dan literasi informasi pemustaka juga menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan layanan sirkulasi mandiri. Data keanggotaan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan untuk mengidentifikasi kelompok pemustaka yang memerlukan pendampingan lebih intensif. Dengan pendekatan ini, layanan keanggotaan tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan peningkatan literasi informasi pemustaka. Hal ini sejalan dengan peran perpustakaan sebagai lembaga layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Integrasi layanan keanggotaan dengan sistem sirkulasi mandiri juga berkontribusi pada peningkatan akurasi dan keamanan transaksi peminjaman. Identitas keanggotaan yang terverifikasi memungkinkan pengelolaan koleksi yang lebih tertib dan akuntabel. Selain itu, sistem keanggotaan yang terintegrasi memudahkan pemantauan tingkat pemanfaatan layanan oleh pemustaka, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan layanan sirkulasi mandiri di masa mendatang. Dengan demikian, layanan keanggotaan berperan penting dalam mendukung keberlanjutan inovasi layanan perpustakaan.

Strategi Penguatan Layanan Keanggotaan dalam Meningkatkan Akses Informasi Publik

Penguatan layanan keanggotaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Layanan keanggotaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga menjadi fondasi integrasi seluruh layanan perpustakaan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi layanan perpustakaan sangat bergantung pada pengelolaan layanan keanggotaan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pemustaka. Oleh karena itu, strategi penguatan layanan keanggotaan perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama dalam penguatan layanan keanggotaan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pustakawan yang terlibat langsung dalam pelayanan. Effendi dan Rahmah (2019) menegaskan bahwa keterbatasan kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam revitalisasi layanan perpustakaan. Pustakawan tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis, tetapi juga mampu memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pemustaka. Dalam layanan keanggotaan, pustakawan berperan penting dalam mengenalkan berbagai layanan yang dapat diakses oleh anggota. Peningkatan kompetensi pustakawan akan berdampak langsung pada kualitas

layanan dan tingkat kepuasan pemustaka.

Strategi berikutnya berkaitan dengan penguatan layanan keanggotaan berbasis digital. Oktavia dan Frinaldi (2024) menunjukkan bahwa inovasi digital mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik. Digitalisasi layanan keanggotaan memungkinkan proses pendaftaran, pemutakhiran data, serta integrasi layanan dilakukan secara lebih efisien dan mudah diakses. Strategi ini sejalan dengan upaya perpustakaan dalam memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan akses informasi publik di era digital.

Selain itu, penguatan layanan keanggotaan perlu didukung oleh pengembangan layanan inti perpustakaan, seperti koleksi dan layanan referensi. Dhia dan Erlianti (2024) menegaskan bahwa koleksi yang relevan merupakan prasyarat utama dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Layanan keanggotaan berperan dalam menghubungkan pemustaka dengan koleksi yang tersedia melalui pemanfaatan data kebutuhan dan preferensi anggota. Sementara itu, Maulana et al. (2025) menunjukkan bahwa layanan referensi dapat meningkatkan akses informasi apabila didukung oleh sosialisasi dan pendampingan yang memadai. Oleh karena itu, integrasi layanan keanggotaan dengan layanan koleksi dan referensi menjadi penting untuk memberikan manfaat optimal bagi pemustaka.

Penguatan layanan keanggotaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan sirkulasi mandiri. Destrina Ningsih dan Primadesi (2025) mengungkapkan bahwa meskipun layanan sirkulasi mandiri mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, kendala teknis dan rendahnya pemahaman pengguna masih menjadi tantangan. Dalam hal ini, layanan keanggotaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemustaka. Integrasi layanan keanggotaan dengan sistem sirkulasi mandiri akan meningkatkan akurasi, keamanan, serta kenyamanan pemustaka dalam mengakses koleksi. Dengan demikian, penguatan layanan keanggotaan turut mendukung keberhasilan dan keberlanjutan inovasi layanan perpustakaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa layanan keanggotaan memiliki peran sentral dalam meningkatkan akses informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Layanan keanggotaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam pemanfaatan berbagai layanan perpustakaan, termasuk layanan berbasis digital, layanan referensi, pengembangan koleksi, serta layanan sirkulasi mandiri. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

keberhasilan inovasi dan penguatan layanan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan layanan keanggotaan. Tanpa layanan keanggotaan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemustaka, potensi layanan perpustakaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, penguatan layanan keanggotaan perlu diarahkan pada integrasi sistem layanan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi pustakawan, serta penguatan fungsi edukatif kepada pemustaka. Layanan keanggotaan yang dikelola secara strategis akan mampu mendorong pemerataan akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai lembaga layanan publik yang inklusif. Dengan demikian, optimalisasi layanan keanggotaan diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhia, F. S., & Erlianti, G. (2024). Implementasi pengembangan koleksi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 1044–1052. <https://doi.org/10.58578/alldyas.v3i3.3626>
- Effendi, E. M., & Rahmah, E. (2019). Penerapan konsep learning commons sebagai upaya dalam revitalisasi layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 8(1), 147–150.
- Maulana, M. L., Alfarez, M., Izza, N. N., & Rahmah, E. (2025). Strategi pemberdayaan layanan referensi untuk meningkatkan akses informasi masyarakat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2515–2520.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, R. D., & Primadesi, Y. (2025). Kualitas layanan sirkulasi mandiri di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4805–4808.
- Oktavia, Y., & Frinaldi, A. (2024). Aplikasi Isumbarmambaco: Inovasi budaya kerja dalam pelayanan publik berbasis digital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatra Barat. *Journal of Education Research*, 5(4), 5874–5885.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan